



SALVAY VASKAH RESU
CERTIFIED TRUE COPY





REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA,

MENGINGAT bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

TELAH menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 1973") dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 2009"),

MENIMBANG lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DENGAN DEMIKIAN, berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran "A"** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran "B"** pada Perjanjian ini.

PASAL 3

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 4

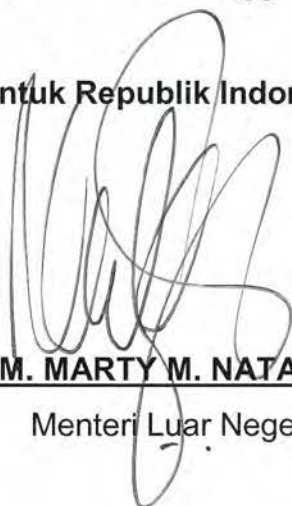
Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

PASAL 5

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

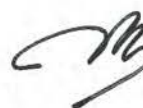
Untuk Republik Indonesia



DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA

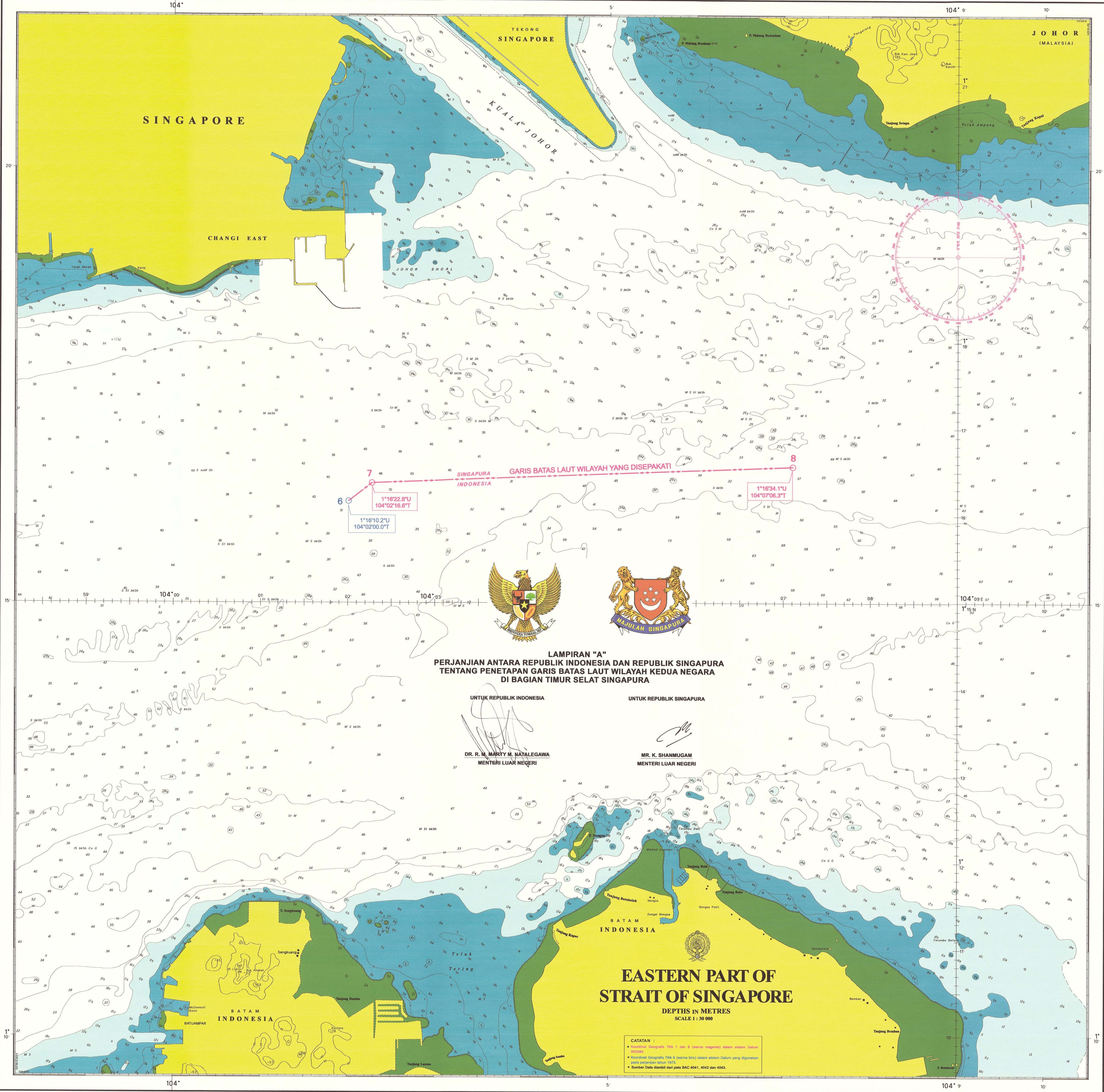
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Singapura



MR. K. SHANMUGAM

Menteri Luar Negeri



LAMPIRAN "B"

WGS84

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



Disahkan oleh:
DR. ASEP KARSIDI
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan oleh:
LAKSMA TNI DR. DEDE YULIADI, M.Sc.
KEPALA DINAS HIDRO-GEOMATIKA
TNI ANGKATAN LAUT

Disahkan oleh:
DR. PARRY DE
KEPALA HIDROGRAFI
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Disahkan oleh:
MR. SOH KHENG PENG
KEPALA SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS
OF THE TWO COUNTRIES
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,

NOTING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

HAVING partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as "1973 Treaty") and the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as "2009 Treaty"),

CONSIDERING further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

DESIRING to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

PURSUANT THERETO, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DUPLICATE at Singapore on 3 September 2014 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

For the Republic of Indonesia



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

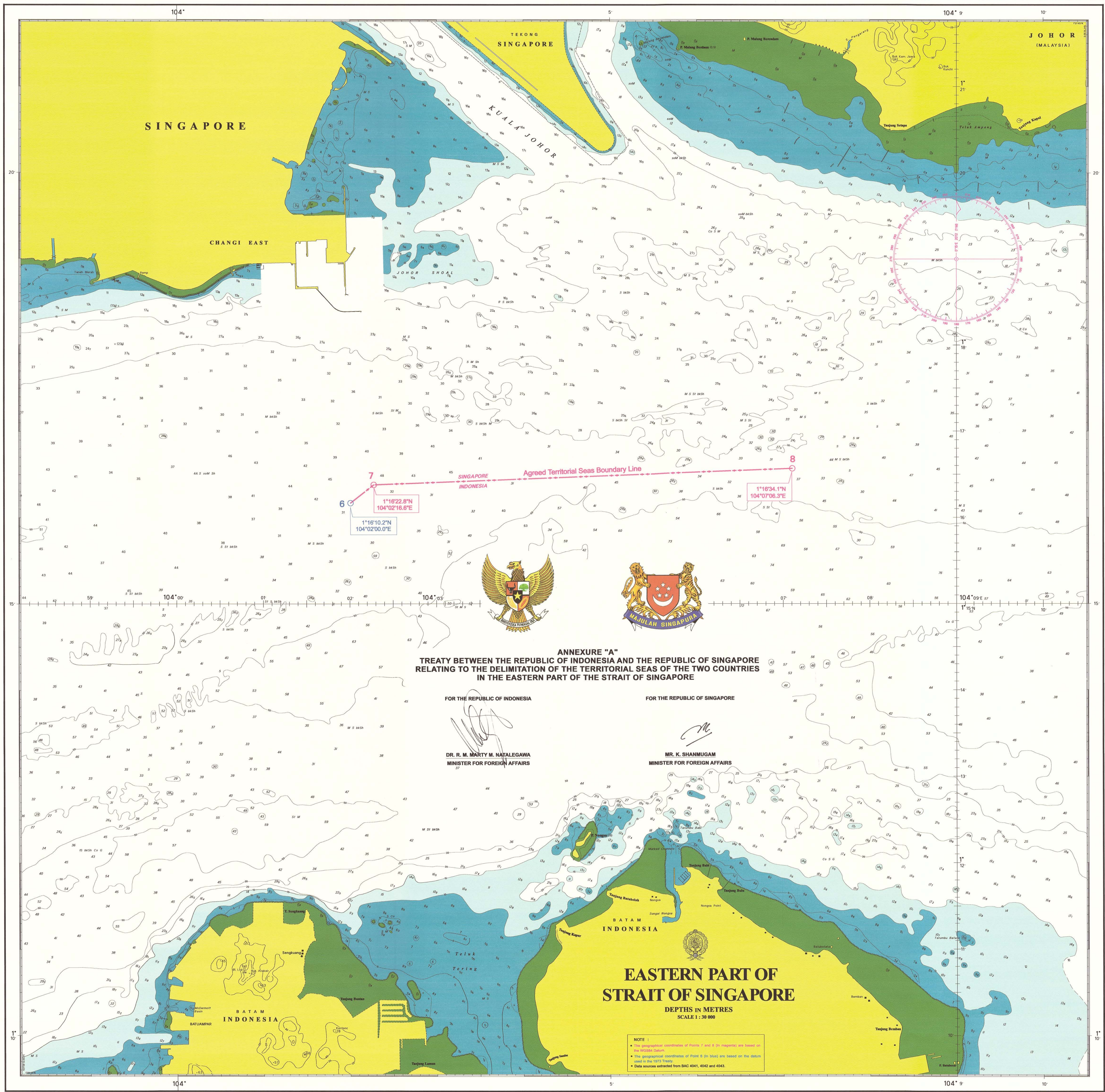
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Singapore



MR. K. SHANMUGAM

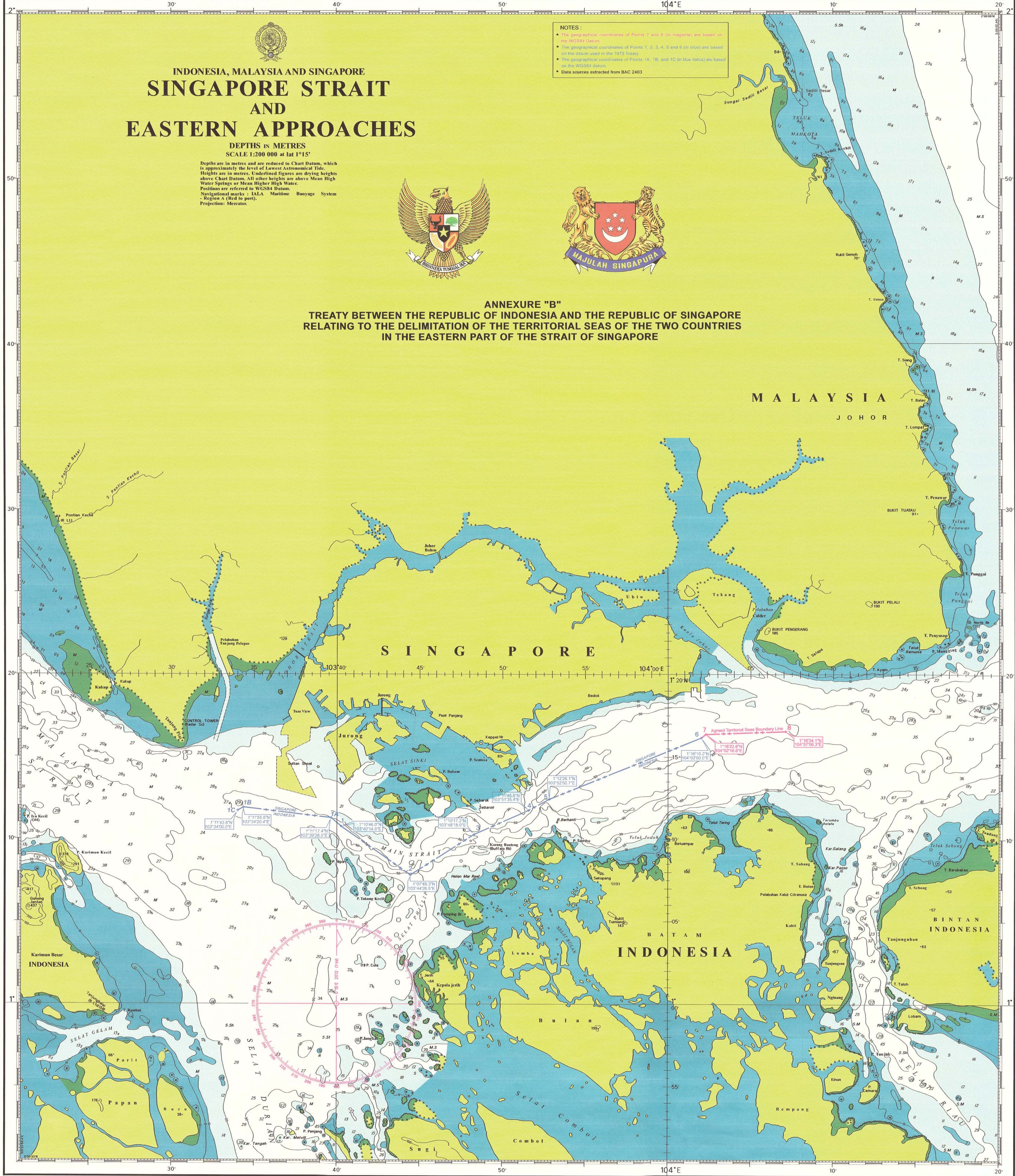
Minister for Foreign Affairs



ANNEXURE "B"


WGS84

FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR NAVIGATION.



Certified by: 
DR. ASEP KARSIDI
HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

Certified by: 
CORE MTS. DEEDE YULADI, M.Sc.
CHIEF HYDROGRAPHER
HYDRO-OCEANOGRAPHIC SERVICE
INDONESIAN NAVY

Certified by: 
DR. PARRY OEI
CHIEF HYDROGRAPHER
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Certified by: 
MR. SOH KHENG PENG
CHIEF SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84



**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA
NEGARA
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA,

MENGINGAT bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

TELAH menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 1973”) dan Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 2009”),

MENIMBANG lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DENGAN DEMIKIAN, berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Singapura dan Republik Indonesia di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran "A"** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oceanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran "B"** pada Perjanjian ini.

PASAL 3

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 4

Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

PASAL 5

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Republik Singapura



MR. K. SHANMUGAM

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Indonesia



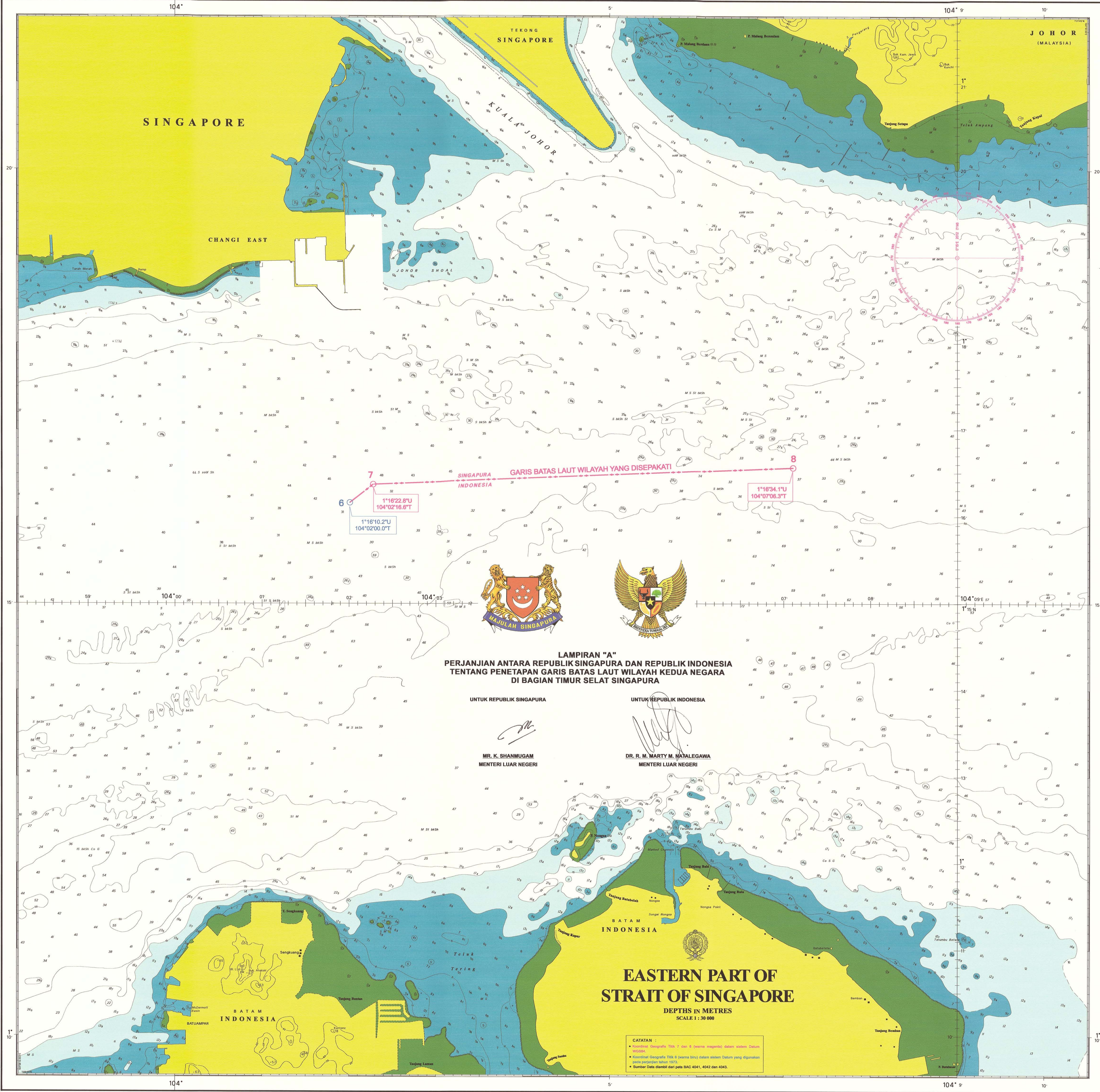
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

WGS84

LAMPIRAN "A"

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



WGS84

Disahkan oleh:
DR. PERRY TAP
KEPALA HIMPUNAN
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

DR. ECH KOENIG PANG
KEPALA HIMPUNAN
SINGAPORE LAND AUTHORITY

Disahkan oleh:
DR. ASAP KASIDI
KEPALA BADAN HIMPUNAN GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAKSMA TNI DR. DEDE YULIADI, M.S.
KEPALA DINAS HIMPUNAN GEOSPASIAL
TNI ANGKATAN LAUT

WGS84

LAMPIRAN "B"

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



Disahkan oleh :
DR. PARRY OOI
KEPALA HIDROGRAFI
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Disahkan oleh :
MR. SOH KHENG PENG
KEPALA SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY

Disahkan oleh :
DR. ASEP KARSIDI
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan oleh :
LAKSMA TIA DEDE YULIADI, M.Sc.
KEPALA DINAS HIDRO-OSANOGRAFI
TNI ANGKATAN LAUT

WGS84



**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF
INDONESIA
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS
OF THE TWO COUNTRIES
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

**THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

NOTING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

HAVING partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as “1973 Treaty”) and the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as “2009 Treaty”),

CONSIDERING further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

DESIRING to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

PURSUANT THERETO, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DUPLICATE at Singapore on 3 September 2014 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

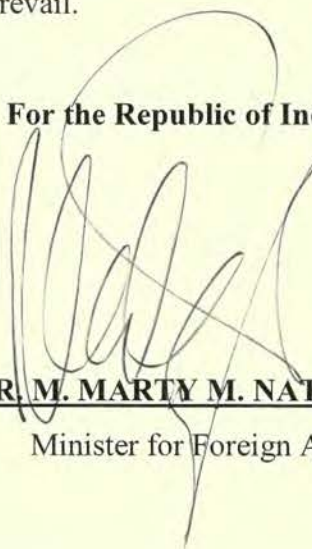
For the Republic of Singapore



MR. K. SHANMUGAM

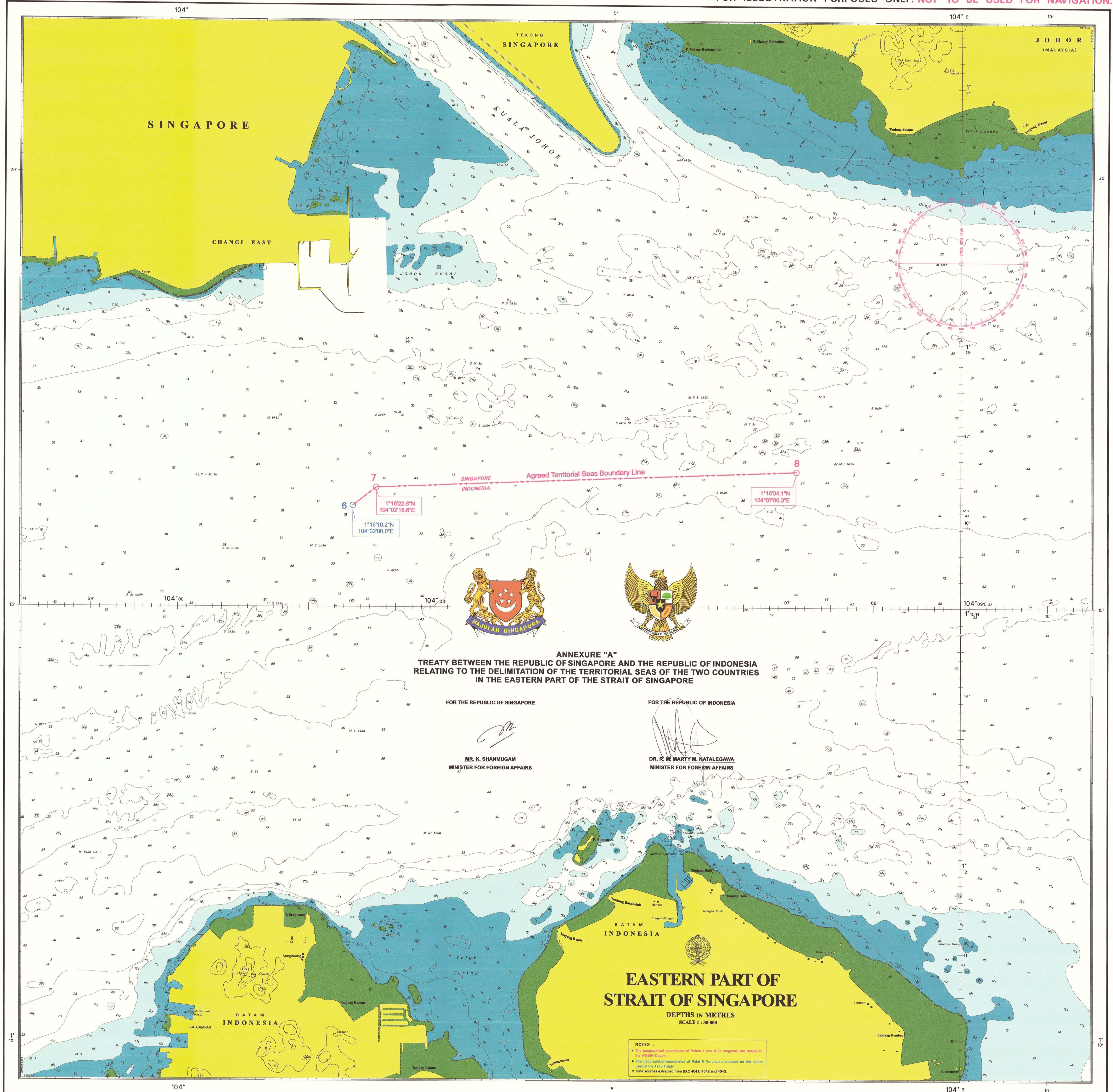
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Indonesia



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Minister for Foreign Affairs



ANNEXURE "B"

WGS84

FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR NAVIGATION.



WGS84

Certified by:
 DR. PARRY DEL
 CHIEF HYDROGRAPHER
 MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

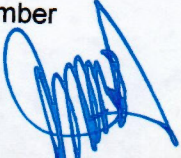
MR. SOH KHENG PENG
 CHIEF SURVEYOR
 SINGAPORE LAND AUTHORITY

Certified by:
 DR. ASEP KARDI
 HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
 REPUBLIC OF INDONESIA

DR. DEDE YULIADI, M.Sc.
 CHIEF HYDROGRAPHER
 HYDRO-OCEANOGRAPHIC SERVICE
 INDONESIAN NAVY

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 04/BK/TR/01/2017/CTC
Number


Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Secretary of Director General of Law and Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 18 Januari 2017
Date